



APBN KiTa Bengkulu Q3 2025: Di Tengah Adaptasi Fiskal, Belanja Negara Tumbuh Agresif, Dorong Kesejahteraan Petani dan Percepatan Infrastruktur

Bengkulu, 29 Oktober 2025 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bengkulu merilis Laporan Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regional hingga 30 September 2025. Laporan ini menunjukkan dualitas kinerja fiskal yang resilien: adaptasi besar pada sisi pendapatan akibat konsolidasi administrasi, diimbangi dengan akselerasi yang agresif pada Belanja Negara, terutama untuk investasi infrastruktur dan layanan publik.

Defisit APBN regional Bengkulu tercatat sebesar Rp8.678,82 M. Defisit yang signifikan ini dikelola secara bijaksana sebagai instrumen strategis pembangunan. Angka ini secara fundamental merefleksikan aliran dana bersih (*Net Flow*) dari Pemerintah Pusat ke Provinsi Bengkulu, yang difokuskan pada penguatan infrastruktur, layanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, demi mewujudkan kemakmuran Bengkulu.

"Kinerja ekonomi Bengkulu menunjukkan resiliensi yang tinggi, didukung oleh daya beli petani yang luar biasa kuat, tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang jauh di atas nasional. Kementerian Keuangan memastikan APBN dikelola secara presisi untuk mengarahkan momentum positif ini menjadi kemakmuran yang merata," demikian pernyataan Kanwil DJPb Bengkulu.

"Kontraksi pendapatan bukanlah cerminan pelemahan ekonomi riil, melainkan adaptasi administrasi. Sementara itu, kami melihat Belanja Modal Kementerian/Lembaga (K/L) melonjak 37,93% (yoy). Ini adalah bukti komitmen Pemerintah Pusat untuk menginjeksi investasi pembangunan di Bengkulu, terlepas dari tantangan fiskal sementara."

1. Resiliensi Ekonomi Makro Regional: Kesejahteraan Petani sebagai Penopang

Kinerja makroekonomi Bengkulu hingga Triwulan III 2025 memperlihatkan fondasi ekonomi daerah yang kokoh dan memiliki daya tahan tinggi (resiliensi) di tengah dinamika ekonomi nasional dan global.

Pertumbuhan dan Stabilitas Harga

Ekonomi Bengkulu pada Triwulan II 2025 tercatat tumbuh sebesar 4,99% (yoy). Meskipun sedikit di bawah capaian pertumbuhan ekonomi nasional (5,12%), pertumbuhan ini berhasil mempertahankan momentum positif yang krusial bagi daerah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Bengkulu per Februari 2025 hanya 3,24%, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional (4,76%). Angka TPT ini juga sejalan dengan target daerah (3,3%-3,4%), yang mencerminkan kemampuan daerah dalam menciptakan dan menyerap lapangan kerja secara efektif.

Dari sisi stabilitas harga, inflasi tahunan (yoy) Bengkulu pada September 2025 tercatat sebesar 2,57%. Angka ini berada di bawah inflasi nasional (2,65%). Meskipun sedikit di atas target daerah (2,11%), tekanan inflasi ini diidentifikasi berasal dari faktor temporer, yaitu kenaikan harga Cabai Merah akibat cuaca buruk dan penurunan produksi serta kenaikan biaya input pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas harga secara umum masih terkendali dan tidak dipicu oleh permintaan yang berlebihan.

Indikator Kesejahteraan Kunci: Daya Beli Petani yang Melimpah

Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi penopang utama narasi resiliensi ekonomi di Bengkulu. NTP Bengkulu pada September 2025 mencapai 208,73, menunjukkan kenaikan 3,43% secara bulanan (mtm). Angka ini sangat jauh melampaui rata-rata NTP nasional (124,36).

NTP di atas 100 mengindikasikan bahwa harga yang diterima petani (penjualan produk) lebih tinggi dibandingkan harga yang mereka bayar (untuk kebutuhan konsumsi dan biaya produksi). NTP yang melonjak hingga 208,73 membuktikan daya beli petani Bengkulu—yang merupakan tulang punggung mata pencaharian daerah—berada dalam kondisi yang sangat kuat di seluruh subsektor. Tingginya daya beli petani ini berfungsi sebagai buffer ekonomi yang vital, menopang konsumsi rumah tangga dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah (4,99%), sekaligus mengimbangi tekanan yang mungkin terjadi pada sektor perdagangan dan industri.

2. Kinerja Pendapatan Negara: Adaptasi Fiskal dan Dampak Revitalisasi Pelabuhan

Realisasi Pendapatan Negara regional Bengkulu hingga 30 September 2025 mencapai Rp1.848,02 miliar, atau 52,16% dari target APBN. Capaian ini terkontraksi sebesar 25,02% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Analisis mendalam menunjukkan bahwa kontraksi ini didorong oleh faktor administratif dan biaya investasi jangka panjang, bukan semata-mata pelemahan aktivitas ekonomi riil di daerah.

Kontraksi Administratif dan Fluktuasi Komoditas

Penerimaan Perpajakan terealisasi sebesar Rp1.471,76 miliar, atau 46,37% dari target, terkontraksi sebesar 29,11% yoy.

Penurunan tajam ini didominasi oleh perubahan kebijakan pencatatan administrasi perpajakan, khususnya implementasi Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU). Kebijakan ini mengalihkan pelaporan dan pembayaran pajak dari Wajib Pajak (WP) besar ke NPWP pusat. Oleh karena itu, penurunan yang terlihat di tingkat daerah sebagian besar bersifat administratif dan tidak merefleksikan penurunan drastis pada kegiatan ekonomi.

Secara rinci, Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas terkontraksi sangat tajam sebesar 58,20% yoy, sejalan dengan implementasi NITKU dan langkah efisiensi anggaran pusat. Sementara itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) turun 17,37% yoy. Penurunan PPN ini tidak hanya dipengaruhi oleh NITKU, tetapi juga oleh faktor eksternal berupa penurunan volume produksi dan harga komoditas utama Bengkulu, seperti sawit, kopi, dan batu bara, yang merupakan basis PPN daerah.

Kinerja PPN yang dipengaruhi harga komoditas menunjukkan perlunya strategi optimalisasi penerimaan di Bengkulu. Kanwil DJPb dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) terus mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi, memperkuat basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui asistensi dan layanan digital untuk mengimbangi fluktuasi komoditas global.

Tantangan Bea Cukai: Biaya Investasi Pelabuhan Jangka Panjang

Penerimaan Bea dan Cukai mencatatkan realisasi terendah sebesar Rp0,061 miliar (4,30% dari target), terkontraksi drastis sebesar 96,12% yoy. Penurunan ekstrem ini bersumber dari belum optimalnya aktivitas ekspor-impor di Pelabuhan Pulau Baai. Kondisi ini disebabkan oleh proses revitalisasi pengerukan alur pelayaran yang masih berlangsung, di mana kedalaman alur baru mencapai 4 meter. Revitalisasi ini merupakan proyek strategis nasional di bawah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025, yang bertujuan meningkatkan kapasitas logistik Bengkulu.

Kontraksi penerimaan Bea Cukai dapat diartikan sebagai biaya yang harus ditanggung untuk investasi infrastruktur maritim yang akan memberikan manfaat jangka panjang. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur telah memastikan bahwa pengerukan Tahap II ditargetkan selesai pada November 2025, dan Tahap III, yang akan mencapai kedalaman 12 meter, ditargetkan selesai pada Juli 2026. Setelah revitalisasi tuntas, Pelabuhan Pulau Baai diharapkan mampu melayani kapal yang lebih besar, secara fundamental meningkatkan volume ekspor Bengkulu dan potensi penerimaan negara dari Bea Keluar dan Bea Masuk.

Meskipun penerimaan fiskal terbatas, Bea Cukai Bengkulu tetap berperan krusial sebagai fasilitator perdagangan luar negeri (nilai ekspor Rp1.068,48 miliar) dan pengawas. Hingga September 2025, Bea Cukai telah melakukan 194 penindakan, termasuk penyitaan 3,18 juta batang rokok ilegal, yang berhasil mencegah potensi kerugian negara sebesar Rp3,17 miliar.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melampaui Target

Di tengah tantangan perpajakan dan kepabeanan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan kinerja positif, mencapai Rp376,26 miliar atau 101,88% dari target APBN.

Capaian ini melampaui target tahunan meskipun terdapat tren pertumbuhan negatif sebesar 3,16% yoy. Pertumbuhan negatif ini semata-mata disebabkan oleh isu teknis pencatatan, yaitu keterlambatan pembayaran jasa pelatihan dari sekolah-sekolah kepada satuan kerja Badan Guru Penggerak. Pembayaran ini diprediksi baru akan tercatat pada Triwulan IV, sehingga tidak mencerminkan penurunan kinerja layanan publik. Kinerja PNBP yang solid ini didorong oleh kontribusi signifikan dari Badan Layanan Umum (BLU), Kepolisian RI (Rp125,1 M), dan Kementerian Agama (Rp58 M), yang secara konsisten memperkuat kemandirian fiskal daerah.

3. Kinerja Belanja Negara: Injeksi Investasi dan Stimulus Ekonomi

Realisasi Belanja Negara hingga 30 September 2025 mencapai Rp10.526,84 miliar, atau 71,19% dari pagu. Realisasi ini terbagi menjadi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp3.021,45 miliar dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKD) sebesar Rp7.505,39 miliar. Meskipun secara keseluruhan Belanja Negara berkontraksi 9,97% yoy (dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025), Pemerintah Pusat berhasil melakukan *quality spending*, yang dibuktikan dengan akselerasi tajam pada Belanja Modal.

Belanja Pemerintah Pusat (BPP): Fokus pada Investasi Fisik

Realisasi BPP mencapai Rp3.021,45 miliar (63,65% dari pagu). Komponen belanja menunjukkan pengalihan fokus anggaran ke investasi riil yang memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) tinggi: Kinerja Belanja Modal K/L menunjukkan pertumbuhan tahunan yang eksplosif sebesar 37,93%. Peningkatan drastis ini mengindikasikan percepatan penyerapan anggaran untuk proyek fisik di daerah. Alokasi terbesar diarahkan untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan (Rp290,89 M) serta Gedung & Bangunan (Rp80,04 M). Belanja Barang juga tumbuh signifikan 17,16% yoy, didorong oleh peningkatan beban barang BLU dan belanja operasional K/L.

Akselerasi Belanja Modal ini menjadi motor penggerak stimulus yang penting, selaras dengan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (P-APBD) Bengkulu tahun 2025 yang juga memfokuskan pada pembangunan infrastruktur. Kenaikan belanja investasi ini secara langsung mendukung pertumbuhan ekonomi Bengkulu dan penyerapan tenaga kerja (yang tercermin dari TPT yang rendah).

4. Transfer ke Daerah (TKD): Dukungan Layanan Publik dan Inovasi Penyaluran

Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKD) terealisasi sebesar Rp7.505,39 miliar atau 74,75% dari Pagu APBN. TKD merupakan pilar utama pembiayaan layanan publik esensial dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kinerja Penyaluran Dana Kesejahteraan dan Pendidikan

Penyaluran dana yang terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan pendidikan menunjukkan kinerja yang sangat tinggi:

- Bantuan Operasional Sekolah (BOSP): Realisasi mencapai Rp461,27 M atau 99,18% dari pagu. Capaian nyaris sempurna ini menjamin operasional dan kualitas pendidikan dasar di Bengkulu berjalan tanpa hambatan.
- Dana Desa (DD): Realisasi mencapai Rp857,19 M atau 82,67% dari pagu. Dana ini disalurkan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur di tingkat desa. Kabupaten Bengkulu Selatan mencatatkan persentase realisasi TKD tertinggi secara keseluruhan, yaitu 81,86%.

5. Inovasi Penyaluran Tunjangan Guru

Kanwil DJPb Bengkulu telah mengimplementasikan inovasi penyaluran Tunjangan Profesi Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (TPG ASN-D) langsung dari Kas Negara ke rekening guru. Mekanisme baru ini menggantikan penyaluran via Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), yang sebelumnya menimbulkan lag waktu. Hingga Triwulan II 2025, TPG telah disalurkan sebesar Rp208,88 miliar kepada 17.100 guru. Penyaluran yang lebih cepat ini secara langsung meningkatkan efisiensi administrasi dan memberikan dampak positif pada kualitas hidup guru serta motivasi mereka dalam mendidik generasi penerus.

6. Tantangan dalam Eksekusi Dana Alokasi Khusus (DAK)

Meskipun penyaluran Dana Desa dan BOSP berjalan optimal, terdapat dua komponen Dana Alokasi Khusus yang realisasinya masih memerlukan dorongan signifikan di Triwulan IV.

Jenis TKD	Pagu (Miliar Rp)	Realisasi (Miliar Rp)	Capaian (% Pagu)
DAK Fisik	397,94	154,71	38,88%
BOK Puskesmas	118,54	46,84	39,51%

Realisasi DAK Fisik (38,88%) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas (39,51%) yang masih rendah menunjukkan adanya tantangan dalam kapasitas absorpsi dan kualitas perencanaan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). DAK Fisik biasanya lambat dieksekusi karena kompleksitas proses pengadaan lahan, desain, dan lelang.

Lambatnya realisasi BOK Puskesmas secara khusus mengindikasikan bahwa pendanaan untuk layanan kesehatan dasar, seperti pencegahan *stunting* dan promosi kesehatan, belum terserap secara optimal. Hal ini harus segera diselesaikan, mengingat Pemda Bengkulu mencatatkan surplus fiskal APBD sebesar Rp717,33 miliar. Ketersediaan dana yang disertai rendahnya realisasi belanja modal daerah (terkontraksi 28,69%) menunjukkan perlunya Pemda segera menuntaskan proses administrasi dan pengadaan agar manfaat infrastruktur dan kesehatan dapat dirasakan masyarakat sebelum akhir tahun anggaran.

7. Pengawasan Program Strategis Nasional: Dampak Langsung kepada Masyarakat

Pemerintah Pusat melalui APBN regional Bengkulu memastikan program strategis yang berorientasi pada pemerataan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berjalan dengan baik.

Proyek Infrastruktur Strategis K/L

Lonjakan Belanja Modal K/L secara langsung membiayai proyek-proyek vital, khususnya di bawah Kementerian PUPR dan Kementerian Agama, yang fokus pada mitigasi bencana dan pendidikan:

- a. Pembangunan Pengendalian Banjir Kota Bengkulu: Realisasi mencapai 58,55% dari total nilai proyek Rp78,84 M. Proyek ini memberikan perlindungan vital bagi ribuan warga dari ancaman bencana alam. Progres proyek ini ditargetkan rampung pada Desember 2025 dan terus diawasi ketat oleh DPR RI dan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII.
- b. Pembangunan Pengaman Pantai di Kaur: Realisasi mencapai 78,13% dari nilai proyek Rp41,70 M, yang sangat penting untuk melindungi permukiman dan mata pencaharian pesisir dari ancaman abrasi.
- c. Pembangunan Gedung Kuliah IAIN Curup: Realisasi mencapai 40,00% dari nilai proyek Rp40,93 M. Ini merupakan investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas SDM pendidikan tinggi di Rejang Lebong, yang sejalan dengan peningkatan layanan pendidikan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Menjamin Kualitas dan Gizi

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bengkulu telah merealisasikan Rp11,35 M dan menjangkau 199.320 penerima manfaat (anak sekolah), dilayani oleh 77 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)/Dapur Regional.

Meskipun realisasi anggaran berjalan, program ini menghadapi tantangan serius terkait kapasitas implementasi. Capaian saat ini baru 41,32% dari target 482.362 penerima. Tantangan krusial lainnya adalah isu tata kelola dan mutu, yaitu belum terdapat penyeragaman penerapan **Sertifikasi SDM dapur dan standar hygiene-sanitasi (SLHS)** pada lintas kabupaten/kota.

Untuk menjaga akuntabilitas publik dan keberlanjutan program, Kanwil DJPb menekankan pentingnya koordinasi lintas sektoral untuk segera menetapkan dan mengimplementasikan standar kebersihan dan sanitasi pada 77 SPPG. Hal ini mutlak diperlukan untuk mencegah risiko kesehatan dan memastikan program mencapai tujuan utamanya dalam meningkatkan gizi anak sekolah.

Sekolah Rakyat (SR): Akses Pendidikan Inklusif

Program Sekolah Rakyat (SR) didirikan untuk memberikan akses pendidikan berasrama bagi siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Hingga September 2025, dua lokasi percontohan (SRMA 6 Kota Bengkulu dan SRT 14 Kaur) telah menerima 185 siswa.

Isu strategis yang mendesak adalah perlunya lahan baru untuk pembangunan SR permanen. Lokasi Sentra Dharma Guna yang digunakan saat ini tidak akan mampu menampung siswa baru mulai tahun ajaran 2026/2027. Pemerintah daerah telah mengusulkan penyediaan lahan baru seluas 5-10 hektar. Selain itu, Kanwil DJPb terus mengawasi isu sentralisasi pengelolaan DIPA yang masih terpusat, yang dapat memengaruhi akuntabilitas keuangan di tingkat SR.

Koperasi Merah Putih (KDMP/KKMP)

Program Koperasi Merah Putih (KDMP) menunjukkan kemajuan signifikan di sisi formalisasi: seluruh 1.508 koperasi telah resmi berbadan hukum (100%) dan 46,88% (707 NPWP) telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Namun, keberlanjutan program ini sangat bergantung pada transisi dari inisiasi pemerintah menuju kelayakan bisnis yang didukung oleh pembiayaan perbankan. Saat ini, belum ada arahan resmi dari Kantor Pusat Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) terkait pembiayaan. Ketidakjelasan Standar

Operasional Prosedur (SOP) dan durasi uji kelayakan pinjaman oleh HIMBARA merupakan risiko utama yang harus diatasi untuk memastikan KDMP/KKMP dapat mandiri dan berkelanjutan.

8. Penutup dan Komitmen Fiskal: Mengawal Pembangunan Triwulan IV

Kinerja APBN regional Bengkulu hingga 30 September 2025 secara keseluruhan menunjukkan bahwa APBN berfungsi optimal sebagai instrumen kontra-siklus dan jangka panjang pembangunan. Meskipun penerimaan negara mengalami kontraksi yang didorong oleh faktor administratif (NITKU) dan investasi infrastruktur (revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai), momentum pertumbuhan ekonomi (4,99%) didukung oleh daya beli petani yang superior (NTP 208,73) dan injeksi investasi Pemerintah Pusat yang berkualitas.

Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dan merealisasikan belanja secara fokus, dibuktikan dengan lonjakan Belanja Modal 37,93% yoy, yang membiayai proyek strategis seperti pengendalian banjir dan pengamanan pantai.

Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu menegaskan komitmen untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN. Untuk memastikan seluruh manfaat APBN terserap maksimal sebelum penutupan tahun anggaran, Kanwil DJPb mendesak seluruh Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja di Bengkulu untuk mengambil langkah percepatan yang mendesak pada Triwulan IV, meliputi:

1. Akselerasi DAK: Segera menuntaskan proses administrasi dan pengadaan untuk DAK Fisik dan BOK Puskesmas yang realisasinya masih di bawah 40%. Percepatan ini krusial untuk memastikan manfaat infrastruktur dan layanan kesehatan dasar tercapai sepenuhnya.
2. Peningkatan Mutu Program Strategis: Memastikan standarisasi hygiene dan sanitasi (SLHS) di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis, serta mempercepat penyediaan lahan permanen untuk program Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026/2027.
3. Sinergi Logistik: Mendukung penuh proses revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai, yang ditargetkan rampung pada 2026, untuk mengoptimalkan potensi ekspor dan mengembalikan kontribusi Bea Cukai Bengkulu.

Narahubung Media:

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan

Laman : djpbn.kemenkeu.go.id/kanwil/bengkulu
Surel : djpbn.bengkulu@kemenkeu.go.id
Telepon : (7365) 511232

Jl. Adam Malik (d.h. Jl. Natadirja No. 271) Km. 8,
Kota Bengkulu 38225

 [djpbengkulu](#)

 [Kanwil DJPb Prov Bengkulu](#)